UNIVERSITAS GADJAH MADA
Problematika Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pedagang Aset Keuangan Digital Kripto dalam Kaitannya dengan Penilaian Langkah Pencegahan dan/atau Pembiaran oleh Pedagang sebagai Korporasi
Gatan Priantama, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Castells, Manuel. The Rise of the Network Society. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2010.

Djulaeka, dan Devi Rahayu. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Hakim, Siagian Abdul. Hukum Perdata. Medan: Pustaka Prima, 2020.

Harvey, Campbell R., Ashwin Ramachandran, and Joey Santoro. DeFi and the Future of Finance. Charlottesville: CFA Institute Research Foundation, 2021.

Hiariej, Eddy O. S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Krisnawati, Dani, Eddy O. S. Hiariej, dkk. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Manan, Abdul. Aspek-Aspek Pengubah Hukum. cet. 3. Jakarta: Kencana, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Saputro, Adery Ardhan, et al. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.

Sjahdeini, Sutan Remy. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.

Sjahdeini, Sutan Remy. Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: Grafiti, 2004.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2005.

Soekanto, Soerjono, dan Purnadi Purbacaraka. Aneka Cara Pembedaan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Sumardjono, Maria S. W. Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Problematika Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pedagang Aset Keuangan Digital Kripto dalam Kaitannya dengan Penilaian Langkah Pencegahan dan/atau Pembiaran oleh Pedagang sebagai Korporasi
Gatan Priantama, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Artikel Jurnal dan Tulisan Akademik

Akbar, Muhammad Fatahillah. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan." Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 3 (2021): 816–817.

Aripkah, Nur. "Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 27, no. 2 (2020): 373–374.

Dell'Erba, Marco. "Crypto-Trading Platforms as Exchanges." Michigan State Law Review (2023).

Hanafi. "The Dynamic Aspects of Criminal Act and Criminal Liability in Money Laundering Practices." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 17, no. 4 (2010): 636.

Hanafi Amrani. "Rezim Anti-Money Laundering: Perkembangan ke Arah Internasionalisasi dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara." Negara Hukum 5, no. 1 (2014): 19–28.

Irham, M. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana." SASI.

Kuoki, Rionaldi Alamsyah, et al. "Identification of Business Models of Cryptocurrency Companies in Indonesia (Study Case PT. Indonesia Digital Exchange and PT. Luno Indonesia)." International Journal of Social Science and Human Research 7, no. 9 (2024).

Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang." Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 2 (2016).

Rauta, Umbu, dan Marcelino Ceasar Kishan. "Studi Asas Kejelasan Rumusan dalam Pembentukan Undang-Undang: Omnibus Law Tematis."

Saipudin, Lalu, et al. "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 13, no. 2 (2025). https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817.

Rotty, Nadia Wulandari, Anggita Cahyani, Daffa Khalisha Nabila, Rachmah Fidiastuti, dan Regentio Candrika Komala Dewa. "Pemanfaatan Cryptocurrency dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." Jurnal Hukum Statuta 1, no. 2 (2022).

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Problematika Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pedagang Aset Keuangan Digital Kripto dalam Kaitannya dengan Penilaian Langkah Pencegahan dan/atau Pembiaran oleh Pedagang sebagai Korporasi
Gatan Priantama, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sriyanti, Rini, Nandang Hidayat, and Rina Marlia. "Penalaran Deduktif, Induktif dan Bahasa dalam Penulisan Ilmiah." Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran 7, no. 4 (2024).

Sunardi, et al. "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Jual Beli." Dinamika 31, no. 1 (2025).

Wardani, Andhira Alya, et al. "Money Laundering through Cryptocurrency and Its Arrangements in Money Laundering Act." Lex Publica (2022).

Skripsi, Tesis, dan Makalah

Anisah, Mutiara. "Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui Cryptocurrency di Indonesia: Studi Perbandingan Amerika Serikat, Kanada, dan Australia." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2022.

Divina, Brigita Puela. "Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Cryptocurrency." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2021.

Fadjarsarie, Dewi. Penguatan Pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT): Konsep Pengawasan Program APU PPT Berbasis Risiko. Bahan presentasi, Otoritas Jasa Keuangan, Bandung, 16 April 2018.

Gabriella, Elia. "Mitigasi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pedagang Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka." Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023.

Muladi. "Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Pidana." Makalah disampaikan pada ceramah di Universitas Muria Kudus, 5 Maret 1990.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penimbunan Barang-Barang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Problematika Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pedagang Aset Keuangan Digital Kripto dalam Kaitannya dengan Penilaian Langkah Pencegahan dan/atau Pembiaran oleh Pedagang sebagai Korporasi
Gatan Priantama, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi goAML bagi Penyedia Jasa Keuangan.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
**Problematika Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pedagang Aset Keuangan Digital
Kripto dalam Kaitannya dengan Penilaian Langkah Pencegahan dan/atau Pembiaran oleh Pedagang sebagai
Korporasi**
Gatan Priantama, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.07/2025 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital.

Putusan dan Dokumen Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 23/PUU-XVI/2018.

United States Department of the Treasury v. U.S. Bank National Association, No. 18 Civ. 1358 (S.D.N.Y. Feb. 15, 2018). Complaint.

Dokumen Internasional dan Laporan

AUSTRAC. “Step 2: Identify and Assess Your Risks.” 31 Maret 2026.

AUSTRAC. “Step 3: Manage and Mitigate Your Risks — AML/CTF Policies.” 27 Maret 2026.

Bank for International Settlements. “Proportionality in Banking Regulation.” July 4, 2018.

Bank for International Settlements. “Proportionality in Financial Regulation: Where Do We Go from Here?” May 8, 2019.

Basel Committee on Banking Supervision. Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering. Basel: Bank for International Settlements, 1988.

Code of Federal Regulations, title 31, § 1010.313(b), “Aggregation.” Accessed May 25, 2026.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Problematika Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pedagang Aset Keuangan Digital Kripto dalam Kaitannya dengan Penilaian Langkah Pencegahan dan/atau Pembiaran oleh Pedagang sebagai Korporasi
Gatan Priantama, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015.

Federal Financial Institutions Examination Council. "Customer Due Diligence — Overview." BSA/AML Examination Manual. 5 Mei 2018.

Financial Action Task Force. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations. Paris: FATF/OECD, 2023.

Financial Action Task Force. Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. Paris: FATF, 2021.

Financial Crimes Enforcement Network. Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering Examination Manual for Money Services Businesses. Washington, D.C.: FinCEN, 2008.

Financial Crimes Enforcement Network. Chapter X Final Rule. 75 Fed. Reg. 65806, October 26, 2010.

Financial Crimes Enforcement Network. "Currency Transaction Report Aggregation for Businesses with Common Ownership." FIN-2012-G001, March 16, 2012.

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada. "Reporting Transactions to FINTRAC: The 24-Hour Rule." 23 Oktober 2023.

He, Dong, et al. "Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations." IMF Staff Discussion Note SDN/16/03. International Monetary Fund, January 2016.

International Monetary Fund. Review of the Fund's Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Strategy. Washington, DC: International Monetary Fund, 2023.

Monetary Authority of Singapore. "Licensing for Payment Service Providers." 2 September 2024.

U.S. Government Accountability Office. Currency Transaction Reports: Improvements Could Reduce Filer Burden While Still Providing Useful Information to Law Enforcement. GAO-25-106500. Washington, DC: U.S. Government Accountability Office, December 2024.

Sumber Internet dan Media

Advance.AI. "Strengthen AML Compliance, and Navigate Regulatory Updates for Digital Customer Onboarding." July 25, 2023.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Problematika Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pedagang Aset Keuangan Digital Kripto dalam Kaitannya dengan Penilaian Langkah Pencegahan dan/atau Pembiaran oleh Pedagang sebagai Korporasi
Gatan Priantama, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ANTARA. “Indodax Catat Volume Transaksi Kripto Rp201,2 Triliun Selama 2025.” 14 Januari 2026.

ANTARA. “Indodax: Investor capai 20,19 juta orang, kripto investasi populer.” 13 Februari 2026.

ANTARA. “Tokocrypto bukukan nilai transaksi Rp160 triliun sepanjang 2025.” 2 Februari 2026.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. “Siaran Pers, 27 Desember 2024.” Jakarta: Bappebti, 2024.

Bank Indonesia. “Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing.” Accessed May 17, 2026.

Bank Indonesia. “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.” Accessed May 17, 2026.

Bank Indonesia. “Ekonomi dan Keuangan Digital - Konsep dan Implementasi di Indonesia.” Accessed May 17, 2026.

Bellis, Mary. “The History of Money.” ThoughtCo. 5 Mei 2025. Diakses 8 Oktober 2025.

Financial Crimes Enforcement Network. “CDD Rule FAQs.” FinCEN.gov. Accessed May 17, 2026.

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada. “Reporting Large Virtual Currency Transactions to FINTRAC.” Government of Canada. Accessed May 25, 2026. https://fintrac-canafe.canada.ca/guidance-directives/transaction-operation/lvctr/lvctr-eng.

GBG. “Enhance Customer Onboarding To Build Trust.” February 28, 2022.

HM Revenue & Customs. “When Customer Due Diligence is required: linked transactions.” HMRC Internal Manuals, May 25, 2023.

INDODAX Help Center. “Apa itu Aset Digital?” Accessed May 17, 2026.

Legal Information Institute. “Actus Reus.” Wex Legal Encyclopedia. Cornell Law School. Last reviewed June 2022.

Monetary Authority of Singapore. Guidelines to MAS Notice PSN02 on Prevention of Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism. Singapore: MAS, 2017.

Otoritas Jasa Keuangan. “Daftar Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital Posisi 21 April 2026.” 21 April 2026.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Problematika Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pedagang Aset Keuangan Digital Kripto dalam Kaitannya dengan Penilaian Langkah Pencegahan dan/atau Pembiaran oleh Pedagang sebagai Korporasi
Gatan Priantama, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Otoritas Jasa Keuangan. “Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.” Accessed May 17, 2026.

Otoritas Jasa Keuangan. “Siaran Pers: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Meningkatnya Tekanan terhadap Kinerja Perekonomian Global.” 5 Juni 2026.

PPATK. “Bersama Pakar Internasional, PPATK Gelar Diskusi untuk Mitigasi Risiko Stablecoin dan Unhosted Wallet.” 16 Desember 2025.

PPATK. “Laporan FATF Mengenai Stablecoin dan Unhosted Wallets.” 12 Maret 2026.

PPATK. “Yuk ingat lagi apa itu Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD).”

Uniify. “Mastering Customer Onboarding in the AML - KYC/KYB Space.” Accessed May 17, 2026.

United States Department of Justice. “Binance and CEO Plead Guilty to Federal Charges in $4B Resolution.” 21 November 2023.

United States Attorney's Office, Eastern District of New York. “Founder and Majority Owner of Bitzlato, a Cryptocurrency Exchange, Charged with Unlicensed Money Transmitting.” 18 Januari 2023.

United States Attorney's Office, Southern District of New York. “Global Cryptocurrency Exchange BitMEX Fined $100 Million for Violating Bank Secrecy Act.” 16 Januari 2025.